

Laporan Keuangan

BPS Kabupaten Lingga

Untuk Periode yang Berakhir
31 Desember 2022



BPS Kabupaten Lingga
Jalan Istana Kota Baru, Daik Lingga

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

BPS Kabupaten Lingga adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Pusat Statistik yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan BPS Kabupaten Lingga mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada BPS Kabupaten Lingga. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Daik, Lingga, 23 Januari 2023

Kepala,



Donny Cahyo Wibowo, SST., M.Si
NIP. 197902032002121008

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
Pernyataan Tanggung Jawab	vi
Indeks Singkatan	vii
i. Ringkasan	viii
ii. Laporan Realisasi Anggaran	viii
iii. Neraca	viii
iv. Laporan Operasional	viii
v. Laporan Perubahan Ekuitas	ix
vi. Catatan Atas Laporan Keuangan	ix
A. Penjelasan Umum	6
A.1 Dasar Hukum	6
A.2 Profil Dan Kebijakan Teknis	9
A.3 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	14
A.4 Basis Akuntansi	14
A.5 Dasar Pengukuran	14
A.6 Kebijakan Akuntansi	15
B Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	21
B.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	24
B.2 Belanja Negara	26
B.3 Belanja Pegawai	27
B.4 Belanja Barang	30
B.5 Belanja Modal	32
B.5.7 Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	33
C. Penjelasan Atas Pos-pos Neraca	34
C.1 Belanja Dibayar di Muka	34
C.2 Persediaan	34
C.3 Tanah	37
C.4 Peralatan Dan Mesin	38
C.5 Gedung Dan Bangunan	39
C.6 Aset Tetap Lainnya	40
C.7 Akumulasi Penyusutan	41
C.8 Aset Tak Berwujud	42
C.9 Aset Lain-lain	43
C.10 Akumulasi Penyusutan/amortisasi Aset Lainnya	44
C.11 Utang Kepada Pihak Ketiga	45
C.12 Ekuitas	46

D. Penjelasan Atas Pos Pos Laporan Operasional	47
D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	47
D.2 Beban Pegawai	48
D.3 Beban Persediaan	51
D.4 Beban Barang Dan Jasa	52
D.5 Beban Pemeliharaan	55
D.6 Beban Perjalanan Dinas	56
D.7 Beban Penyusutan Dan Amortisasi	58
D.8 Kegiatan Non Operasional	59
E. Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	60
E.1 Ekuitas Awal	60
E.2 Surplus/defisit-lo	60
E.3 Koreksi Menambah/mengurangi Nilai Ekuitas	60
E.3.1 Koreksi Atas Reklasifikasi	61
E.4 Transaksi Antar Entitas	61
E.4.1 Diterima Dari Entitas Lain (ddel)/ditagihkan Ke Entitas Lain(dkel)	62
E.4.2 Transfer Masuk/transfer Keluar	63
E.5 Ekuitas Akhir	63
F. Pengungkapan Lainnya	64
F.1 Pejabat Perbendaharaan	64
F.2 Rekonsiliasi	65
F.3 Rekening Pemerintah	66
F.4 Anggaran	66
F.4.1 Diterima Dari Entitas Lain (ddel)/ditagihkan Ke Entitas Lain(dkel)	66
F.4.2 Transfer Masuk/transfer Keluar	66
F.5 Jurnal-Jurnal	69
F.6 Kerjasama	70
F.7 Ralat SPM	70
F.8 Penanganan Pandemi Covid di Lingkungan Satker	70

DAFTAR TABEL

Tabel	Uraian Tabel	Halaman
Tabel 1	Rincian Penyisihan Piutang Berdasarkan Kualitas Piutang	17
Tabel 2	Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap	19
Tabel 3	Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud	20
Tabel 4	Rincian Anggaran	21
Tabel 5	Tabel Uraian Rincian Revisi DIPA	22
Tabel 6	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan	24
Tabel 7	Perbandingan Realisasi Pendapatan	25
Tabel 8	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja	26
Tabel 9	Perbandingan Realisasi Belanja	27
Tabel 10	Perbandingan Belanja Pegawai	28
Tabel 11	Perbandingan Belanja Barang	30
Tabel 12	Perbandingan Realisasi Belanja Modal	32
Tabel 13	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33
Tabel 14	Rincian Belanja Dibayar di Muka	34
Tabel 15	Rincian Persediaan	35
Tabel 16	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	41
Tabel 17	Rincian Aset Tak berwujud	42
Tabel 18	Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	44
Tabel 19	Rincian Utang Pada Pihak Ketiga	45
Tabel 20	Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak	46
Tabel 21	Perbandingan Nilai LO dan LRA Pendapatan Negara Bukan Pajak	47
Tabel 22	Rincian Beban Pegawai	48
Tabel 23	Perbandingan Nilai LO dan LRA Beban Pegawai	49
Tabel 24	Rincian Beban Persediaan	51
Tabel 25	Rincian Beban Barang dan Jasa	52
Tabel 26	Perbandingan Nilai LO dan LRA Beban Barang dan Jasa	53
Tabel 27	Rincian Beban Pemeliharaan	55
Tabel 28	Perbandingan Nilai LO dan LRA Beban Pemeliharaan	56
Tabel 29	Rincian Beban Perjalanan Dinas	56
Tabel 30	Perbandingan Nilai LO dan LRA Beban Perjalanan Dinas	57
Tabel 31	Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi	58
Tabel 32	Tabel Rincian Non Operasional	59
Tabel 33	Rincian Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	60
Tabel 34	Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas	61
Tabel 35	Rincian Transfer Masuk	63

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan BPS Kabupaten Lingga yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2022 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Daik, Lingga, 23 Januari 2023
Kepala,



Donny Cahyo Wibowo, SST., M.Si
NIP. 197902032002121008

INDEKS SINGKATAN

APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BPS	:	Badan Pusat Statistik
BPK	:	Badan Pemeriksa Keuangan
DIPA	:	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
LKKL	:	Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
LKPP	:	Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
CaLK	:	Catatan atas Laporan Keuangan
SAP	:	Standar Akuntansi Pemerintahan
SAPP	:	Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
SAIBA	:	Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual
SAK	:	Sistem Akuntansi Keuangan
SIMAK BMN	:	Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara
LRA	:	Laporan Realisasi Anggaran
LO	:	Laporan Operasional
LPE	:	Laporan Perubahan Ekuitas
KUN	:	Kas Umum Negara
PNBP	:	Penerimaan Negara Bukan Pajak
TP	:	Tuntutan Perbendaharaan
TGR	:	Tuntutan Ganti Rugi
KDP	:	Konstruksi Dalam Pengerjaan
UP	:	Uang Persediaan
SSBP	:	Surat Setoran Bukan Pajak
SATKER	:	Satuan Kerja
KPPN	:	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
PPAKP	:	Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah
RKP	:	Rencana Kerja Pemerintah
RPJM	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah
RENSTRA	:	Rencana Strategi

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan BPS Kabupaten Lingga Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022.

Realisasi Pendapatan Negara Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2022 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp16.941.552 atau mencapai 929,83 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp1.822.000.

Realisasi Belanja Negara Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp6.041.511.475 atau mencapai 96,88 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp6.236.194.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2022. Nilai Aset per 31 Desember 2022 dicatat dan disajikan sebesar Rp3.046.684.103 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp92.274.707 Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,00 Aset Tetap (neto) sebesar Rp2.951.159.396 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp3.250.000.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp97.025.918 dan Rp2.949.658.185.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.821.552, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp6.304.658.725 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp6.302.837.173. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp13.959.000 dan sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp6.288.878.173.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2022 adalah sebesar Rp3.076.248.513 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp6.288.878.173 ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp6.162.287.845 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2022 adalah senilai Rp2.949.658.185.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2022 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2022 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BPS Kabupaten Lingga
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2022		% terhadap Anggaran	31 Desember 2021
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	1.822.000	16.941.552	929,83	55.375.476
JUMLAH PENDAPATAN		1.822.000	16.941.552	929,83	55.375.476
Belanja Negara	B.2	6.236.194.000	6.041.511.475	96,88	3.535.244.122
Belanja Pegawai	B.3	2.124.026.000	2.072.209.158	97,56	1.938.432.773
Belanja Barang	B.4	4.112.168.000	3.969.302.317	96,53	1.477.678.349
Belanja Modal	B.5	0	0	0,00	119.133.000
JUMLAH BELANJA		6.236.194.000	6.041.511.475	96,88	3.535.244.122

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

BPS Kabupaten Lingga
NERACA
Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2022	31 Desember 2021
ASET			
ASET LANCAR			
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.1	12.493.151	0
Persediaan	C.2	79.781.556	51.440.755
Jumlah Aset Lancar		92.274.707	51.440.755
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Jumlah Piutang Jangka Panjang		0	0
ASET TETAP			
Tanah	C.3	1.408.890.000	1.408.890.000
Peralatan Dan Mesin	C.4	1.552.568.047	1.567.864.513
Gedung Dan Bangunan	C.5	1.258.534.000	1.258.534.000
Aset Tetap Lainnya	C.6	143.489.684	136.332.834
Akumulasi Penyusutan	C.7	(1.412.322.335)	(1.271.580.364)
Jumlah Aset Tetap		2.951.159.396	3.100.040.983
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.8	25.700.000	25.700.000
Aset Lain-lain	C.9	417.634.223	381.750.257
Akumulasi Penyusutan/amortisasi Aset Lainnya	C.10	(440.084.223)	(397.812.757)

Jumlah Aset Lainnya		3.250.000	9.637.500
JUMLAH ASET		3.046.684.103	3.161.119.238
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.11	97.025.918	84.870.725
JUMLAH KEWAJIBAN		97.025.918	84.870.725
EKUITAS			
Ekuitas	C.12	2.949.658.185	3.076.248.513
JUMLAH EKUITAS		2.949.658.185	3.076.248.513
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		3.046.684.103	3.161.119.238

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

BPS Kabupaten Lingga
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2022	31 Desember 2021
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	1.821.552	1.670.476
JUMLAH PENDAPATAN		1.821.552	1.670.476
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	2.084.256.601	1.944.574.003
Beban Persediaan	D.3	163.852.121	106.669.381
Beban Barang dan Jasa	D.4	2.632.458.145	887.267.940
Beban Pemeliharaan	D.5	139.237.856	145.615.388
Beban Perjalanan Dinas	D.6	1.101.840.565	364.194.721
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	183.013.437	188.623.083
JUMLAH BEBAN		6.304.658.725	3.636.944.516
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(6.302.837.173)	(3.635.274.040)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.8	0	0
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		0	1.312.500
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		15.120.000	0
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		1.161.000	0
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		13.959.000	52.392.500
SURPLUS/DEFISIT		(6.288.878.173)	(3.582.881.540)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BPS Kabupaten Lingga
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Ekuitas awal	E.1	3.076.248.513	3.151.537.323
Surplus/defisit-LO	E.2	(6.288.878.173)	(3.582.881.540)
Koreksi menambah/mengurangi nilai ekuitas	E.3	0	3.864.400
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.3.1	0	3.864.400
Transaksi Antar Entitas	E.4	6.162.287.845	3.503.728.330
Diterima dari entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)	E.4.1	6.024.569.923	3.479.868.646
Transfer Masuk/Transfer Keluar	E.4.2	137.717.922	23.859.684
Kenaikan/Penurunan Ekuitas		(126.590.328)	(75.288.810)
Ekuitas Akhir	E.5	2.949.658.185	3.076.248.513

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan

Dasar Hukum **A.1. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 532/KMK.6/2015 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi BMN Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara/Lembaga;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian BMN;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga;
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2019 tentang Perubahan PMK Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara;
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.05/2019 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat;
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.02/2020 tentang Pengelolaan Anggaran Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Program Pemulihan Ekonomi Nasional;
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.05/2021 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban APBN Dalam Penanganan Pandemi Covid-19;
30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI;
31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.05/2021 tentang Sistem Akuntansi Hibah;
32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;
33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.05/2022 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan Mekanisme Crash Program Tahun Anggaran 2022;

34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.05/2022 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Pada Masa Pandemi Covid 2019 Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun 2022 Dan Akan Dilanjutkan Pada Tahun Anggaran 2023;
35. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
36. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
37. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
38. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
39. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.6/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
40. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KM.6/2013 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 145/KM.6/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KM.6/2013;
41. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;
42. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KM.6/2016 tentang Modul Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;
43. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 385/KM.6/2016 tentang Modul Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dan Pematkhiran Data Barang Milik Negara;
44. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-85/PB/2011 tentang Pedoman Penatausahaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga;
45. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-16/PB/2014 tentang Tata Cara Koreksi Data Transaksi Keuangan Pada Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara; dan
46. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-43/PB/2015 tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga;

Entitas dan Rencana Strategis **A.2. Profil dan Kebijakan Teknis BPS Kabupaten Lingga**

Badan Pusat Statistik (BPS) adalah institusi pemerintah yang memiliki kewenangan melakukan kegiatan statistik berupa sensus dan survei, untuk menghasilkan data dan statistik yang dibutuhkan baik oleh pemerintah, swasta, maupun masyarakat pada umumnya sesuai Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999. Sebagai rujukan dalam perencanaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap hasil-hasil pembangunan, penyediaan data statistik yang berkualitas menjadi sangat menentukan karena akan berdampak kepada efektifitas pengambilan keputusan yang dilakukan. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang baik untuk menentukan arah kebijakan dan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan dan mewujudkan visi BPS. Untuk menyongsong pembangunan nasional jangka menengah tahun 2020-2024, BPS menyusun Rencana Strategis yang mencerminkan upaya peningkatan dan kemampuan BPS menyediakan data statistik yang berkualitas, serta upaya untuk menjalankan perannya- sebagai pembina dan koordinator kegiatan statistik dalam kerangka pembangunan Sistem Statistik Nasional (SSN) secara lebih efektif. Rencana Strategis Badan Pusat Statistik (Renstra BPS) tahun 2020-2024, disusun berlandaskan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan RPJM Nasional Tahun 2020-2024, serta memperhatikan masukan dari para pemangku kepentingan (stakeholders). Dalam mencapai tujuannya, BPS memiliki Visi dan Misi sebagai berikut:

Visi BPS : **"Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju,"**

("Provider of Qualified Statistical Data for Advanced Indonesia")

Misi BPS:

1. Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional;
2. Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan;
3. Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional; dan
4. Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah

Melalui visi dan misi tersebut, BPS memiliki aspirasi untuk mencapai tujuan strategis. Tujuan strategis ini mencerminkan fokus perubahan yang akan dilakukan oleh BPS dalam periode Renstra 2020-2024, yakni bahwa BPS berupaya terus menerus untuk meningkatkan:

1. Kualitas dari produk yang dihasilkannya (data statistik).
2. Kualitas dari pelayanan untuk mendiseminasi data statistik kepada penggunaanya dengan dukungan dan peranan TIK.
3. Efektifitas di dalam melakukan pembinaan dan koordinasi kegiatan statistik.
4. Kualitas dari proses tata kelola (governance) di dalam organisasinya.

Untuk mencapai tujuan strategis tersebut diwadahi dalam sejumlah program, yakni:

1. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS). Program ini bertujuan untuk menyediakan dan memberikan pelayanan informasi statistik yang berkualitas dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna data. Untuk menyediakan data dan informasi statistik tersebut, BPS secara berkesinambungan melakukan penyempurnaan dan pengembangan kegiatan pengumpulan, pengolahan, pengkajian dan analisis, serta diseminasi data dan informasi statistik.
2. Program Dukungan Manajemen BPS. Program generik BPS ini bertujuan untuk memberi dukungan manajemen dan kelancaran pelaksanaan kegiatan teknis di bidang penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas. Dasar kebijaksanaan dalam program ini diarahkan untuk :
 1. Kegiatan peningkatan kapasitas SDM statistik yang unggul melalui sekolah kedinasan dan pusat pendidikan pelatihan;
 2. Kegiatan operasional penyelenggaraan lembaga seperti perencanaan program dan kegiatan, pemantauan dan evaluasi kegiatan, penyediaan alokasi gaji pegawai, dan peningkatan fungsi kehumasan;
 3. Memelihara dan meningkatkan sarana dan prasarana fisik yang telah ada di BPS, antara lain kenyamanan dan kelengkapan fasilitas ruang kerja, serta penyediaan rumah dinas dan sarana transportasi untuk pusat dan daerah;
 4. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan, pengelolaan administrasi keuangan dan administrasi barang di seluruh satuan kerja BPS Pusat maupun Daerah

Kode	Realisasi Belanja	Keluaran				Keterangan	Status
	%	Ren-cana	Real/Vol	Satuan	%		
054.01.GG							
2897							
2897.BDB.003	39,30	1	1	Lembaga	100	s.d. Desember, PCRO mencapai 100% dengan RVRO sebesar 1 lembaga. Gap yg cukup tinggi karena di bulan Desember kegiatan tetap berjalan di wilayah daratan yang tidak perlu menggunakan biaya.	Terkonfirmasi
2897.BMA.004	95,97	1	1	Layanan	100	s.d. Desember, PCRO mencapai 100% dengan RVRO sebesar 1 layanan.	Terkonfirmasi
2898							
2898.BMA.007	82,20	1	1	Layanan	100	s.d. Desember, PCRO mencapai 100% dengan RVRO sebesar 1 layanan.	Terkonfirmasi

2899							
2899.BMA.006	94,00	1	1	Layanan	100	s.d. Desember, PCRO mencapai 100% dengan RVRO sebesar 1 layanan.	Terkonfirmasi
2900							
2900.BMA.005	100,00	1	1	Layanan	100	s.d. Desember, PCRO mencapai 100% dengan RVRO sebesar 1 layanan.	Terkonfirmasi
2902							
2902.BMA.004	77,31	1	1	Layanan	100	s.d. Desember, PCRO mencapai 100% dengan RVRO sebesar 1 layanan. gap yg cukup tinggi karena terdapat beberapa kegiatan perjalanan ke luar kota yang tidak menggunakan anggaran di kabupaten.	Terkonfirmasi
2903							
2903.BMA.009	86,85	1	1	Layanan	100	s.d. Desember, PCRO mencapai 100% dengan RVRO sebesar 1 layanan.	Terkonfirmasi
2904							
2904.BMA.006	94,12	1	1	Layanan	100	s.d. Desember, PCRO mencapai 100% dengan RVRO sebesar 1 layanan.	Terkonfirmasi
2905							
2905.BMA.004	95,94	1	1	Layanan	100	s.d. Desember, PCRO mencapai 100% dengan RVRO sebesar 1 layanan.	Terkonfirmasi
2905.QMA.006	96,93	1	1	Publikasi	100	s.d. Desember, PCRO mencapai 100% dengan RVRO sebesar 1 publikasi.	Terkonfirmasi
2906							
2906.BMA.006	96,62	1	1	Layanan	100	s.d. Desember, PCRO mencapai 100% dengan RVRO sebesar 1 layanan.	Terkonfirmasi

2907							
2907.BMA.006	47,17	1	1	Layanan	100	s.d. Desember, PCRO mencapai 100% dengan RVRO sebesar 1 layanan. Gap yang cukup tinggi karena kegiatan pendataan lapangan tidak memerlukan anggaran perjalanan.	Terkonfirmasi
2907.QMA.009	98,99	1	1	Layanan	100	s.d. Desember, PCRO mencapai 100% dengan RVRO sebesar 1 layanan.	Terkonfirmasi
2908							
2908.BMA.004	93,98	1	1	Layanan	100	s.d. Desember, PCRO mencapai 100% dengan RVRO sebesar 1 layanan.	Terkonfirmasi
2909							
2909.BMA.005	44,96	1	1	Layanan	100	s.d. Desember, PCRO mencapai 100% dengan RVRO sebesar 1 layanan.	Terkonfirmasi
2910							
2910.QMA.006	98,80	1	1	Layanan	100	s.d. Desember, PCRO mencapai 100% dengan RVRO sebesar 1 layanan.	Terkonfirmasi
2910.QMA.007	69,74	1	1	Layanan	100	s.d. Desember, PCRO mencapai 100% dengan RVRO sebesar 1 layanan. gap yang cukup tinggi karena terdapat kegiatan yang tidak bisa dilakukan pencairan.	Terkonfirmasi
2910.QMA.010	87,38	1	1	Layanan	100	s.d. Desember, PCRO mencapai 100% dengan RVRO sebesar 1 layanan. Gap yang tinggi karena terdapat kegiatan yang tidak bisa dilakukan pencairan.	Terkonfirmasi

'054.01.WA							
2886							
2886.EBA.956	63,55	1	1	Layanan	100	s.d. Desember, PCRO mencapai 100% dengan RVRO sebesar 1 layanan. Gap yang cukup tinggi karena terdapat kegiatan yang tidak memerlukan anggaran.	Terkonfirmasi
2886.EBA.962	45,09	1	1	Layanan	100	s.d. Desember, PCRO mencapai 100% dengan RVRO sebesar 1 layanan. Gap yang cukup karena terdapat kegiatan rapat internal yang tidak memerlukan biaya.	Terkonfirmasi
2886.EBA.994	97,00	2	2	Layanan	100	s.d. Desember, PCRO mencapai 100% dengan RVRO sebesar 2 layanan.	Terkonfirmasi
2886.EBC.954	80,00	14	14	Orang	100	s.d. Desember, PCRO mencapai 100% dengan RVRO sebesar 14 orang	Terkonfirmasi
2886.EBD.952	85,38	1	1	Dokumen	100	s.d. Desember, PCRO mencapai 100% dengan RVRO sebesar 1 layanan.	Terkonfirmasi
2886.EBD.955	95,91	3	3	Dokumen	100	s.d. Desember, PCRO mencapai 100% dengan RVRO sebesar 3 dokumen.	Terkonfirmasi
2886.EBD.961	63,89	1	1	Dokumen	100	s.d. Desember, PCRO mencapai 100% dengan RVRO sebesar 1 dokumen. Gap yang cukup tinggi karena terdapat kegiatan pembinaan yang tidak memerlukan anggaran.	Terkonfirmasi

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh BPS Kabupaten Lingga. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Basis
Akuntansi

A.4. Basis Akuntansi

BPS Kabupaten Lingga menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar
Pengukuran

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan BPS Kabupaten Lingga dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi **A.6. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan BPS Kabupaten Lingga Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan BPS Kabupaten Lingga Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Pendapatan- LRA **(1) Pendapatan- LRA**

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan LO **(2) Pendapatan- LO**

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada BPS Kabupaten Lingga adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja **(3) Belanja**

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban **(4) Beban**

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset **(5) Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar **a. Aset Lancar**

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Rincian Penyisihan Piutang Berdasarkan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	<ol style="list-style-type: none"> 1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN 	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap b. Aset Tetap

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta ribu rupiah);
 - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pada Tahun 2017 dan 2018, Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah.

Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Pelaksanaan revaluasi dilakukan dengan pendekatan pasar, pendekatan biaya, dan / atau pendekatan pendapatan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018.

- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap **c. Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - Tanah
 - Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 2

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang
Jangka
Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset
Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban (6) Kewajiban

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - Kewajiban Jangka Pendek Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanjayang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas (7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, BPS Kabupaten Lingga telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal.

Tabel 4
Rincian Anggaran

Uraian	2022	
	ANGGARAN AWAL (Rp)	ANGGARAN SETELAH REVISI (Rp)
Pendapatan		
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	1.822.000	1.822.000
Pendapatan Lain-Lain	0	0
Jumlah Pendapatan	1.822.000	1.822.000
Belanja		
BELANJA PEGAWAI	1.747.132.000	2.124.026.000
BELANJA BARANG	2.157.057.000	4.112.168.000
BELANJA MODAL	0	0
Jumlah Belanja	3.904.189.000	6.236.194.000

Dari tabel diatas dapat diketahui (dari DIPA Awal sampai DIPA Akhir) bahwa Pagu Anggaran untuk pos Belanja Barang mengalami kenaikan yang sangat sangat signifikan, begitu juga dengan pos Belanja Pegawai. Sementara itu, Pagu Anggaran untuk pos Pendapatan tidak mengalami perubahan anggaran. Adapun dasar dilakukannya revisi DIPA ini diantaranya adalah karena Perubahan Rencana Penarikan Dana dan Penyesuaian Anggaran Pendataan Awal Regsosek . Maka dari itu sampai dengan periode pelaporan 31 Desember 2022 ini, BPS Kabupaten Lingga telah melakukan 16 (enam belas kali) kali Revisi DIPA. Berikut tabel uraian rincian Revisi DIPA tersebut:

Tabel 5
Uraian Rincian Revisi DIPA

Revisi Ke	Tanggal Pengesahan	Uraian/Alasan Revisi	Pagu Awal (Rp.)	Pagu Revisi (Rp.)	Selisih (Rp.)	Kewenangan	Dasar Revisi
-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
1	15 Desember 2021	Revisi DIPA I tentang Pemblokiran Tunjangan Kinerja	3.904.189.000	3.904.189.000	0	DJA	Berdasarkan Surat Kepala BPS Pusat Nomor: B-760/02000/PR.440/12/2021 tanggal 10 Desember 2021 tentang pemblokiran Tunjangan Kinerja yang melekat pada Gaji ke-13 dan THR
2	9 Pebruari 2022	Revisi DIPA II tentang Penambahan/Pengurangan Alokasi dan/ atau target RO Prioritas Nasional	3.904.189.000	4.303.703.000	399.514.000	DJA	Berdasarkan surat revisi Nomor : B-057/02000/PR.440/01/2022 tanggal 02 Februari 2022 tentang Penambahan/Pengurangan Alokasi dan/atau Target RO Prioritas Nasional
3	15 Pebruari 2022	Revisi dalam rangka Pemutakhiran data hasil revisi POK dan Perubahan Rencana Penarikan Dana dalam Halaman III DIPA	4.303.703.000	4.303.703.000	0	DJPb	Berdasarkan S-034/BPS/2104.92800/02/2022 Tanggal 11 Februari 2022 yang memuat Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA dan Pemutakhiran
4	07-Apr-22	Revisi dalam rangka Pemutakhiran data hasil revisi POK dan Perubahan Rencana Penarikan Dana dalam Halaman III DIPA	4.303.703.000	4.303.703.000	0	DJPb	Berdasarkan Surat revisi Nomor: S-053/2104.92800/04/2022 Tanggal 05 April 2022 perihal revisi Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA dan Pemutakhiran Data Hasil Revisi POK
5	27 Mei 2022	Revisi dalam rangka Penyesuaian Kegiatan Tahun 2022	4.303.703.000	4.363.730.000	60.027.000	DJA	Berdasarkan Surat dari Sestama BPS Nomor : B-258/02000/PR.440/04/2022 tanggal 18 April 2022 tentang Revisi Anggaran dalam rangka Penyesuaian Kegiatan Tahun 2022
6	15 Juni 2022	Revisi DIPA Antar Satker Se-Indonesia karena realokasi belanja dan Revisi dalam rangka Penambahan Automatic Adjustment/Blokir Anggaran Belanja TA 2022	4.363.730.000	4.363.730.000	0	DJA	Berdasarkan Surat Pengguna Anggaran BPS Nomor B-186/01000/PR.440/05/2022 tanggal 31 Mei 2022 perihal Penambahan Automatic Adjustment Belanja TA 2022
7	12 Juli 2022	Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA dan Pemutakhiran Data Hasil Revisi POK	4.363.730.000	4.363.730.000	0	DJPb	Berdasarkan surat dari KPA BPS Kabupaten Lingga Nomor: S-097/2104.92800/07/2022 Tanggal 08 Juli 2022 perihal revisi Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA dan Pemutakhiran Data Hasil Revisi POK

8	11 Agustus 2022	Revisi DIPA Satker tentang dalam rangka Penyesuaian Kegiatan Tahun 2022	4.363.730.000	4.762.576.000	398.846.000	DJA	Berdasarkan surat Sestama BPS Nomor : B-501/02000/PR.440/07/2022 tanggal 22 Juli 2022 tentang Revisi Anggaran dalam rangka Penyesuaian Kegiatan Tahun 2022
9	25 Agustus 2022	Revisi DIPA Satker dalam rangka Penambahan Anggaran Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Tahun 2022	4.762.576.000	6.458.388.000	1.695.812.000	DJA	Berdasarkan surat Sestama BPS Nomor : B-585/02000/PR.440/08/2022 tanggal 23 Agustus 2022 tentang Dasar Hitung Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) tahun 2022
10	29 Agustus 2022	Pencantuman/ Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA dan Pemutakhiran Data Hasil Revisi POK	6.458.388.000	6.458.388.000	0	DJA	Berdasarkan surat Sestama BPS Nomor: B-603/02000/PR.440/08/2022 tanggal 26 Agustus 2022 perihal Revisi DIPA Pembukaan Blokir Anggaran Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Tahun 2022
11	26 September 2022	Revisi DIPA Satker dalam rangka Penyesuaian Anggaran Pendataan Awal Regsosek 2022	6.458.388.000	6.458.388.000	0	DJPb	Berdasarkan surat Sestama BPS Nomor : B-1100/02100/PR.440/09/2022 tanggal 11 September 2022 Tanggapan Permohonan Ijin Revisi Halaman IV.B DIPA TA 2022 se-Provinsi Kepulauan Riau
12	3 Oktober 2022	Pencantuman/ Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA dan Pemutakhiran Data Hasil Revisi POK	6.458.388.000	6.458.388.000	0	DJPb	Berdasarkan surat dari KPA BPS Kabupaten Lingga Nomor: B-141/21041/PR.440/09/2022 Tanggal 29 September 2022 perihal revisi Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA dan Pemutakhiran Data Hasil Revisi POK
13	20 Oktober 2022	Revisi DIPA Satker dalam rangka Pemenuhan Kekurangan Belanja Pegawai dan Penyesuaian Kegiatan Tahun 2022	6.458.388.000	6.408.966.000	-49.422.000	DJA	Berdasarkan Surat Kepala BPS Pusat Nomor: B-731/02000/PR.440/09/2022 tanggal 30 September 2022 tentang Revisi Anggaran dalam rangka Pemenuhan Kekurangan Belanja Pegawai dan Penyesuaian Kegiatan Tahun 2022
14	24-Nov-22	Revisi DIPA Satker dalam rangka Revisi Antar Satker untuk pemenuhan kebutuhan pengolahan Regsosek 2022	6.408.966.000	6.446.766.000	37.800.000	DJPb	Berdasarkan surat dari KPA BPS Kabupaten Lingga Nomor: B-164/21041/PR.440/1/12/2022 Tanggal 18 November 2022 perihal Usulan Revisi Anggaran antar Satker

15	12 Desember 2022	Revisi DIPA Satker dalam rangka Realokasi Automatic Adjustment ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara	6.446.766.000	6.236.194.000	-210.572.000	DJA	Berdasarkan Surat Kepala BPS Pusat Nomor: B-988/02000/PR.440/11/2022 tanggal 24 November 2022 tentang Revisi Anggaran dalam rangka Realokasi Automatic Adjustment ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara
16	29 Desember 2022	Pencantuman/ Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA dan Pemutakhiran Data Hasil Revisi POK	6.236.194.000	6.236.194.000	0	DJPb	Berdasarkan surat dari KPA BPS Kabupaten Lingga Nomor: B-218/21041/PR.440/12/2022 Tanggal 28 Desember 2022 perihal revisi Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA dan Pemutakhiran Data Hasil Revisi POK

Realisasi PNB **B.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak**

Rp16.941.552

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp16.941.552 atau mencapai 929,83 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp1.822.000. Rincian Pendapatan BPS Kabupaten Lingga sebagai berikut:

Tabel 6
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2022		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Real Anggaran
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	1.822.000	1.821.552	99,98
Pendapatan Lain-Lain	0	15.120.000	0
Jumlah	1.822.000	16.941.552	929,83

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2022 BPS Kabupaten Lingga memiliki estimasi anggaran untuk Pendapatan sebesar Rp1.822.000,- dengan realisasi sebesar Rp16.941.552,-. Sementara Perbandingan Realisasi Pendapatan sampai dengan periode pelaporan 31 Desember 2022 jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, dapat disajikan pada tabel.

Tabel 7
Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022(Rp)	Realisasi 31 Desember 2021(Rp)	Naik (Turun) %
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	1.821.552	55.375.476	(96,71)
Pendapatan Lain-Lain	15.120.000	0	0,00
Jumlah	16.941.552	55.375.476	(69,41)

Realisasi Pendapatan 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar 69,41 persen dibandingkan realisasi pendapatan pada 31 Desember 2021.

Dapat kita perhatikan pada tabel di atas tersebut yang mengalami penurunan pada Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN sebesar 96,71 persen. Berikut penjelasan uraian perubahan tersebut :

Uraian	Realisasi 31 Desember	Realisasi 31 Desember	Naik (Turun)
	2022	2021	%
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	53.705.000	-100
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	1.821.552	1.670.476	9,04
Jumlah	1.821.552	55.375.476	96,71

Berikut penjelasan uraian tersebut:

- Pada tahun 2022 tidak terdapat pemindahtanganan BMN seperti tahun sebelumnya
- Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan senilai Rp 1.821.552,- didapatkan dari uang sewa rumah dinas Kepala BPS Kabupaten Lingga selama 12 bulan. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan merupakan Pendapatan atas Sewa Rumah Dinas yang dihuni oleh para Pejabat di lingkungan BPS Provinsi Kepulauan Riau, dimana setiap bulannya dilakukan pemotongan melalui SPM Gaji Induk. Mengacu pada SK KPA BPS Provinsi Kepulauan Riau Nomor SK 038 Tahun 2021 Tanggal 13 Desember 2021.

Perihal Penunjukan Penghuni Rumah Negara Golongan 1 di lingkungan BPS Kabupaten Lingga Tahun 2022, terdapat 1 (satu) Rumah Dinas yang ditempati oleh pejabat di lingkungan BPS Kabupaten Lingga, sebagai berikut :

Nama	Type	Tarif Sewa
Donny Cahyo Wibowo, SST., M.Si.	C	151.796

Sementara itu, Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu merupakan pengembalian Belanja Pegawai diantaranya disebabkan kelebihan pembayaran Tunjangan Fungsional Tahun 2021-2022.

*Realisasi Belanja
Negara
Rp6.041.511.475*

B.2 Belanja

Realisasi Belanja instansi per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp6.041.511.475 atau 96,88 persen dari anggaran belanja sebesar Rp6.236.194.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

*Tabel 8
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja 31 Desember 2022*

Uraian	2022		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Real Anggaran
BELANJA PEGAWAI	2.124.026.000	2.072.209.158	97,56
BELANJA BARANG	4.112.168.000	3.969.302.317	96,53
BELANJA MODAL	0	0	0,00
Jumlah Netto	6.236.194.000	6.041.511.475	96,88

Dari tabel di atas dapat memberikan informasi bahwa selama periode sampai dengan 31 Desember 2022, BPS Kabupaten Lingga mampu menyerap anggaran sebesar Rp 6.041.511.475,- atau sebesar 96,88 persen dari total pagu anggaran yang mencapai Rp 6.236.194.000,-. Jika dijabarkan berdasarkan jenis belanjanya, diperoleh informasi bahwa Belanja Pegawai menyerap anggaran sebesar 97,56 persen, dan Belanja Barang 96,53 persen, sedangkan belanja modal nihil karena memang tidak dianggarkan pada tahun anggaran 2022. Sementara perbandingan pencapaian realisasi antara 31 desember 2022 dengan 2021 tersaji pada tabel.

Tabel 9
Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	Naik (Turun) %
BELANJA PEGAWAI	2.087.839.158	1.939.543.076	7,65
BELANJA BARANG	3.969.820.717	1.477.678.349	168,65
BELANJA MODAL	0	119.133.000	(100,00)
Jumlah Bruto	6.057.659.875	3.536.354.425	71,30
Pengembalian Belanja	16.148.400	1.110.303	1.354,41
Jumlah	6.041.511.475	3.535.244.122	70,89

Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar 70,89 persen dibandingkan realisasi belanja pada 31 Desember 2021.

Hal tersebut terlihat pada tabel di atas bahwa kenaikan terjadi hampir pada semua pos Belanja, terkecuali belanja modal. Belanja Pegawai mengalami kenaikan sebesar 7,65 persen; dan Belanja Barang meningkat sangat signifikan hingga 168,65 persen.

Uraian/ penjelasan lengkap mengenai perbandingan realisasi untuk masing masing jenis belanja pada tahun 2022 dengan 2021 tersaji pada penjelasan di bawah ini.

Belanja Pegawai **B.3 Belanja Pegawai**
Rp2.072.209.158

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp2.072.209.158 dan Rp1.938.432.773. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Tabel 10
Perbandingan Belanja Pegawai Sampai dengan 31 Desember 2022
dan 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1.056.756.926	1.061.660.480	(0,46)
Belanja Lembur	2.386.000	9.766.000	(75,57)
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	1.028.696.232	868.116.596	18,50
Jumlah Bruto	2.087.839.158	1.939.543.076	7,65
Pengembalian Belanja	15.630.000	1.110.303	1.307,72
Jumlah	2.072.209.158	1.938.432.773	8,39

Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar 8,39 persen dari 31 Desember 2021. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Belanja Gaji dan Tunjangan PNS mengalami sedikit penurunan yakni sebesar 0,46 persen karena meskipun ada penambahan 6 (orang) orang CPNS dan pembayaran kekurangan gaji karena adanya penyetaraan tunjangan fungsional sebanyak 2 (dua) orang pegawai, namun nilai belanja pada tahun 2022 masih lebih kecil dibanding tahun sebelumnya karena pada tahun 2021 jumlah pegawai berstatus statistisi muda lebih banyak, dan adanya pembayaran gaji terusan sebanyak dua orang pegawai yang meninggal dunia.
2. Belanja lembur mengalami penurunan drastis, yaitu sebesar 75,57 persen dikarenakan seluruh pegawai sudah 100 persen Work From Office (WFO), seluruh pekerjaan diupayakan selesai pada jam kerja normal.
3. Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito mengalami kenaikan sebesar 18,50 persen karena adanya penambahan Tunjangan Hari Raya sebesar 50 persen melalui peraturan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2022 dan kekurangan Tunjangan Hari Raya karena adanya penyetaraan tunjangan fungsional sebanyak 4 (empat) orang pegawai

Pengembalian Belanja Pegawai mengalami kenaikan sangat signifikan sebesar 1.307,72 persen karena pengembalian tunjangan struktural sebanyak 2 (dua) orang PNS.

KODE	URAIAN BELANJA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN
			BELANJA	PENGEM-BALIAN BELANJA	BELANJA NETTO	
1	2	4	5	6	7=5-6	8=5/4
511111	Gaji Pokok PNS	701.241.000	700.262.020	0	700.262.020	99,86
511119	Pembulatan Gaji PNS	20.000	15.340	0	15.340	76,70
511121	Tunj. Suami/Istri PNS	29.462.000	29.324.842	0	29.324.842	99,53
511122	Tunj. Anak PNS	9.618.000	9.553.844	0	9.553.844	99,33
511123	Tunj. Struktural PNS	33.891.000	33.840.000	14.040.000	19.800.000	99,85
511124	Tunj. Fungsional PNS	113.230.000	99.840.000	1.590.000	98.250.000	98,17
511125	Tunj. PPh PNS	2.023.000	2.022.800	0	2.022.800	99,99
511126	Tunj. Beras PNS	34.329.000	34.327.080	0	34.327.080	99,99
511129	Uang Makan PNS	132.892.000	125.856.000	0	125.856.000	94,71
511151	Tunj. Umum PNS	22.673.000	21.715.000	0	21.715.000	95,77
512211	Uang Lembur	11.079.000	2.386.000	0	2.386.000	21,57
512411	Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	1.033.568.000	1.028.696.232	0	1.028.696.232	99,53
JUMLAH KEL. BELANJA 51		2.124.026.000	2.087.839.158	15.630.000	2.072.209.158	98,30

Belanja Barang
Rp3.969.302.317

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp3.969.302.317 dan Rp1.477.678.349.

Tabel 11
Perbandingan Belanja Barang Sampai dengan 31 Desember 2022
dan 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	331.189.860	320.156.100	3,45
Belanja Barang Non Operasional	2.255.364.186	515.433.900	337,57
Belanja Barang Persediaan	77.450.000	81.445.000	(4,91)
Belanja Jasa	66.002.250	51.674.340	27,73
Belanja Pemeliharaan	137.973.856	144.774.288	(4,70)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.101.840.565	364.194.721	202,54
Jumlah Bruto	3.969.820.717	1.477.678.349	168,65
Pengembalian Belanja	518.400	0	0,00
Jumlah	3.969.302.317	1.477.678.349	168,69

Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar 168,69 persen dari Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2021.

Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Meningkatnya belanja barang operasional sebesar 3.45 persen dikarenakan seluruh pegawai sudah 100 persen Work From Office (WFO) sehingga keperluan perkantoran serta honor operasional satker meningkat.
2. Meningkatnya belanja barang non-operasional sebesar 337,57 persen karena adanya kegiatan Longform SP2020 yang dilaksanakan pada tahun ini, padahal menurut jadwal seharusnya dilaksanakan pada tahun 2021. Selain itu munculnya kegiatan baru diakhir tahun 2022 yakni pengumpulan data serta pengolahan Regsosek juga menyebabkan kenaikan signifikan pada belanja ini.
3. Meningkatnya belanja jasa sebesar 27,73 disebabkan adanya realisasi sewa bangunan gudang untuk penyimpanan barang ST2023 yang diambil dari anggaran Pendataan Awal Regsosek 2022, kenaikan penggunaan daya listrik Prabayar dan PDAM karena bertambahnya jumlah pegawai.

4. Terdapat peningkatan belanja barang perjalanan dalam negeri sebesar 202,54 persen karena segala kegiatan pelatihan dan rapat sudah dilaksanakan secara tatap muka di tahun 2022 sehingga membutuhkan Belanja Perjalanan Dinas yang besar.

KODE	URAIAN BELANJA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN
			BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO	
1	2	4	5	6	7=5-6	8=5/4
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	232.957.000	231.432.710	0	231.432.710	99,35
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2.028.000	582.540	0	582.540	28,72
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	86.280.000	85.980.000	0	85.980.000	99,65
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi	17.475.000	13.194.610	0	13.194.610	75,51
521211	Belanja Bahan	273.752.000	252.464.388	0	252.464.388	92,22
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	2.004.974.000	1.956.134.900	518.400	1.955.616.500	97,54
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	22.579.000	14.144.898	0	14.144.898	62,65
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi	21.250.000	20.630.000	0	20.630.000	97,08
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	13.500.000	11.990.000		11.990.000	88,81
521811	Barang Persediaan Barang Konsumsi	75.770.000	74.450.000	0	74.450.000	98,26
521841	Barang Persediaan - COVID-19	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	100,00
522111	Langganan Listrik	32.174.000	31.085.250	0	31.085.250	96,62
522113	Langganan Air	1.142.000	874.000	0	874.000	76,53
522141	Belanja Sewa	18.243.000	18.243.000		18.243.000	100,00
522151	Belanja Jasa Profesi	4.000.000	3.800.000	0	3.800.000	95,00
522191	Belanja Jasa Lainnya	12.333.000	12.000.000	0	12.000.000	97,30
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0	0	0	0	-

523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	51.780.000	49.649.975	0	49.649.975	95,89
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	95.636.000	85.518.881	0	85.518.881	89,42
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan	3.700.000	2.805.000	0	2.805.000	75,81
524111	Belanja Perjalanan Biasa	133.694.000	122.717.590	0	122.717.590	91,79
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	276.583.000	254.306.000	0	254.306.000	91,95
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	707.682.000	704.546.000	0	704.546.000	99,56
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	21.636.000	20.270.975	0	20.270.975	93,69
JUMLAH BELANJA 52		4.112.168.000	3.969.820.717	518.400	3.969.302.317	96,53

Belanja Modal Rp0

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp119.133.000. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

*Tabel 12
Perbandingan Realisasi Belanja Modal sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	119.133.000	(100,00)
Jumlah Bruto	0	119.133.000	(100,00)
Pengembalian Belanja	0	0	0,00
Jumlah	0	119.133.000	(100,00)

Realisasi Belanja Modal mengalami penurunan pada 31 Desember 2022 sebesar 100,00 persen dibandingkan 31 Desember 2021 disebabkan oleh karena tidak terdapat Realisasi Belanja Modal sama sekali karena tidak tersedia pos anggaran belanja modal pada tahun anggaran 2022.

B.5.7 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 119.133.000,-.

Tabel 13
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31
Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2022 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	119.133.000	(100,00)
Jumlah Bruto	0	119.133.000	(100,00)
Pengembalian Belanja	0	0	0,00
Jumlah	0	119.133.000	(100,00)

Realisasi tersebut pada 31 Desember 2022, mengalami penurunan sebesar 100,00 persen bila dibandingkan dengan realisasi 31 Desember 2021 sebesar Rp119.133.000. Hal ini disebabkan karena, pada tahun anggaran 2022 sama sekali tidak tersedia anggaran guna peruntukan belanja modal di lingkup satuan kerja BPS Kabupaten Lingga.

C.PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Belanja Dibayar di Muka Rp12.493.151

C.1 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp12.493.151 dan Rp0. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

*Tabel 14
Rincian Belanja Dibayar di Muka 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

Jenis	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021(Rp)
Belanja Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	12.493.151	0
Jumlah	12.493.151	0

Belanja Barang yang Dibayar Dimuka per 31 Desember 2022 senilai Rp12.493.151,- merupakan Belanja Sewa berupa sewa gudang penyimpanan dokumen di BPS Kabupaten Lingga tahun 2022. Belanja tersebut sesuai SPM Nomor 00180A Tanggal 28 Oktober 2022 dengan nilai kontrak sebesar Rp 15.000.000,-. Perikatan kontrak didasarkan atas Surat Perjanjian Nomor 21.04.III.03/PPK/2022 dengan rincian pengadaan sewa Gudang Penyimpanan Dokumen yang dilaksanakan selama satu tahun, mulai dari tanggal 1 November 2022 sampai dengan 31 Oktober 2023.

Persediaan Rp79.781.556

C.2 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp79.781.556 dan Rp51.440.755. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 15
Rincian Persediaan Sampai 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Jenis	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Barang Konsumsi	79.181.556	51.380.755
Bahan untuk Pemeliharaan	600.000	60.000
Jumlah	79.781.556	51.440.755

Mutasi Nilai Persediaan 31 Desember 2022 dijelaskan sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2021	51.440.755
Mutasi Tambah :	
Pembelian	75.646.000
Transfer Masuk	117.167.922
Reklasifikasi Masuk	870.000
Hasil Opname Fisik	2.340.000
Total Mutasi Tambah :	196.023.922
Mutasi Kurang :	
Habis Pakai	(166.192.121)
Rusak	(1.161.000)
Reklasifikasi Keluar	(870.000)
Total Mutasi Kurang :	(168.223.121)
Kenaikan(Penurunan)	27.800.801
Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2022	79.241.556

Saldo akhir Persediaan per 31 Desember 2022 senilai Rp 79.781.556,- merupakan total nilai Barang Konsumsi dan Bahan Untuk Pemeliharaan. Barang Konsumsi senilai Rp 79.181.556,- sedangkan Bahan untuk Pemeliharaan senilai Rp 600.000,-. Berikut penjelasan untuk mutasi Persediaan:

Penjelasan Mutasi Persediaan meliputi Mutasi Tambah:

- Pembelian Persediaan periode sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp 75.646.000 pada BPS Kabupaten Lingga merupakan:
 - Barang Konsumsi seperti Alat Tulis Kantor berupa kertas, pensil, pena, spidol, penjepit kertas, ordner & map, amplop, dan lain-lain serta *komputer supplies* berupa tinta/toner printer, *wireless mouse*, *portable SSD*, batu baterai, dan lain-lain,
 - Bahan Untuk Pemeliharaan seperti Peralatan Kebersihan, Alat Pengikat, Bahan Kimia Pembersih, Pengharum ruangan, Perabot Kantor, dan lain- lainnya.
 - Barang konsumsi terkait penanganan Covid-19 seperti masker, handsanitizer, disinfektan spray, dan hand soap.
- Transfer Masuk periode 31 Desember 2022 ini sebesar Rp 79.181.556,- pada BPS Kabupaten Lingga adalah Transfer Masuk dari BPS Provinsi Kepulauan Riau terutama berupa dokumen dan perlengkapan kegiatan lapangan seperti Susenas, Survei Pertanian Lapangan Pangan, IMK, Survei Harga, Longform SP2020, dan Persiapan ST2023.
- Hasil Opname Fisik periode 31 Desember 2022 sebesar Rp 2.340.000, merupakan hasil opname fisik barang berupa Dokumen Regsosek22-K yaitu dokumen baik sebanyak 1.310 set dan dokumen rusak sejumlah 1.290 set.

Penjelasan Mutasi Persediaan meliputi Mutasi Kurang:

- Pemakaian sampai dengan periode per 31 Desember 2022 sebesar Rp166.192.121,-. Mengingat Persediaan itu merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dalam hal ini juga di BPS Kabupaten Lingga pasti terdapat konsumsi pemakaian persediaan seperti yang dijelaskan sebelumnya persediaan yang terdapat adalah Barang Konsumsi dan Bahan untuk Pemeliharaan.
- Barang Rusak sampai dengan periode per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.161.000,-, merupakan hasil opname fisik barang Dokumen Regsosek22-K sebanyak 1.290 set.

Tanah
Rp1.408.890.000

C.3 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.408.890.000 dan Rp1.408.890.000. Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2021	1.408.890.000
Mutasi Tambah :	
Total Mutasi Tambah :	0
Mutasi Kurang :	
Total Mutasi Kurang :	0
Kenaikan(Penurunan)	0
Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2022	1.408.890.000

Sampai dengan akhir periode tahun anggaran 2022 tidak terdapat mutasi nilai penambahan/pengurangan untuk aset tanah.

Berikut rincian Saldo Tanah BPS Kabupaten Lingga per 31 Desember 2022:

No.	KIB	Alamat	No. Sertifikat	Luas m ²	Nilai (Rp)
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	Jl. Istana Robat RT 05 RW 03 Daik Lingga	Sertifikat Hak Pakai No.22	500	114.780.000
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jl. Istana Kota Baru, Komplek Perkantoran Pemda, Daik Lingga	Sertifikat Hak Pakai No.15	6.000	1.294.110.000
Total					1.408.890.000

Peralatan dan Mesin
Rp1.552.568.047

C.4 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp1.552.568.047 dan Rp1.567.864.513. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2021	1.567.864.513
Mutasi Tambah :	
Transfer Masuk	20.550.000
Total Mutasi Tambah :	20.550.000
Mutasi Kurang :	
Penghentian Aset Dari Penggunaan	(35.846.466)
Total Mutasi Kurang :	(35.846.466)
Kenaikan(Penurunan)	(15.296.466)
Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2022	1.552.568.047
Akumulasi Penyusutan sampai dengan 31 Desember 2022	(1.244.968.236)
Nilai Buku sampai dengan 31 Desember 2022	307.599.811

- Penjelasan Mutasi Tambah : Mutasi tambah pada satuan kerja BPS Kabupaten Lingga sampai dengan periode 31 Desember 2022 bersumber dari Transfer Masuk, yang berasal dari BPS Provinsi Kepulauan Riau berupa Aset Tetap Peralatan dan Mesin, yakni satu unit printer senilai Rp 20.550.000,-
- Penjelasan Mutasi Kurang : Mutasi tambah pada satuan kerja BPS Kabupaten Lingga sampai dengan periode 31 Desember 2022 bersumber dari Penghentian Aset Dari Penggunaan karena kondisi rusak berat dan tidak dapat digunakan lagi, berupa satu buah Unit Power Supply dan satu unit Auto Switch/Data Switch.

Gedung
dan
Bangunan
Rp1.258.
534.000

C.5 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp1.258.534.000 dan Rp1.258.534.000. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2021	1.258.534.000
Mutasi Tambah :	
Total Mutasi Tambah :	0
Mutasi Kurang :	
Total Mutasi Kurang :	0
Kenaikan(Penurunan)	0
Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2022	1.258.534.000
Akumulasi Penyusutan sampai dengan 31 Desember 2022	(167.354.099)
Nilai Buku sampai dengan 31 Desember 2022	1.091.179.901

Hingga akhir tahun anggaran 2022, saldo Nilai Perolehan atas gedung dan bangunan berjumlah Rp1.258.534.000,-. Setelah dikurangi dengan depresiasi nilai gedung dan bangunan sebanyak Rp167.354.099,-; maka nilai buku sampai dengan 31 Desember 2022 menjadi Rp1.091.179.901,-. Sepanjang tahun 2022 tidak ada mutasi tambah maupun mutasi kurang pada gedung dan bangunan BPS Kabupaten Lingga. Berikut rincian Gedung dan Bangunan BPS Kabupaten Lingga:

Jenis Gedung Bangunan	Alamat	Saldo Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jalan Istana Kota Baru, Daik Lingga	797.153.000	106.935.158	690.217.842
Rumah Negara Gol I Tipe C Permanen	Jalan Istana Robot, Daik Lingga	144.217.000	18.885.559	125.331.441
Pagar Permanen	Jalan Istana Kota Baru, Daik Lingga	317.164.000	41.533.382	275.630.618
		1.258.534.000	167.354.099	1.091.179.901

Aset Tetap Lainnya
Rp143.489.684

C.6 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp143.489.684 dan Rp136.332.834. Nilai mutasi atas aset tetap per 31 Desember 2022 disajikan pada tabel berikut:

Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2021	136.332.834
Mutasi Tambah :	
Perolehan Lainnya	7.194.350
Total Mutasi Tambah :	7.194.350
Mutasi Kurang :	
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(37.500)
Total Mutasi Kurang :	(37.500)
Kenaikan(Penurunan)	7.156.850
Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2022	143.489.684
Akumulasi Penyusutan sampai dengan 31 Desember 2022	0
Nilai Buku sampai dengan 31 Desember 2022	143.489.684

Aset Tetap Lainnya yang dimiliki BPS Kabupaten Lingga berupa buku dan publikasi statistik. Hingga 31 Desember 2022, tercatat mutasi tambah yang diperoleh BPS Kabupaten Lingga bernilai Rp 7.194.350,- dari total 54 buah publikasi yang masuk di tahun anggaran 2022.

No	Aset	Jumlah (Buah)	Nilai
1	Serial Lainnya	54	7.194.350
Jumlah			7.194.350

Selain itu, juga terdapat mutasi keluar serial lainnya ke aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah sejumlah delapan buah buku publikasi senilai Rp 37.500,- karena kondisinya sudah rusak berat berdasarkan Hasil Sensus BMN tahun 2021.

C.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp1.412.322.335*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing Rp1.412.322.335 dan Rp1.271.580.364. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

*Tabel 16
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2022*

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Peralatan dan Mesin	1.552.568.047	1.244.968.236	307.599.811
Gedung dan Bangunan	1.258.534.000	167.354.099	1.091.179.901
Aset Tetap Lainnya	143.489.684	0	143.489.684
Jumlah	2.954.591.731	1.412.322.335	1.542.269.396

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tak
Berwujud
Rp25.700.000

C.8 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp25.700.000 dan Rp25.700.000. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada berupa software yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 17
Rincian Aset Tak berwujud 31 Desember 2022

Uraian	Nilai Perolehan
Software	25.700.000
Jumlah	25.700.000

Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2021	25.700.000
Mutasi Tambah :	
Total Mutasi Tambah :	0
Mutasi Kurang :	
Total Mutasi Kurang :	0
Kenaikan(Penurunan)	0
Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2022	25.700.000
Akumulasi Amortisasi sampai dengan 31 Desember 2022	(22.487.500)
Nilai Buku sampai dengan 31 Desember 2022	3.212.500

Tidak terdapat mutasi pada aset tak berwujud sepanjang tahun anggaran 2022. Pada satuan kerja BPS Kabupaten Lingga, *software* yang tercantum dalam list aset tak berwujud berupa aplikasi *Microsoft Office Pro Plus 2019* yang berasal dari transaksi transfer masuk dari BPS tahun 2020.

C.9 Aset Lain-lain

Aset Lain-lain
Rp417.634.223

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp417.634.223 dan Rp381.750.257. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2021	381.750.257
Mutasi Tambah :	
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	35.883.966
Total Mutasi Tambah :	35.883.966
Mutasi Kurang :	
Total Mutasi Kurang :	0
Kenaikan(Penurunan)	35.883.966
Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2022	417.634.223
Akumulasi Penyusutan sampai dengan 31 Desember 2022	(417.596.723)
Nilai Buku sampai dengan 31 Desember 2022	37.500

Penjelasan Mutasi Tambah :

- Penambahan Aset Lain-lain pada satuan kerja BPS Kabupaten Lingga tahun 2022 dibanding tahun 2021 senilai Rp 35.875.366,- berasal Penghentian Aset Dari Penggunaan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis BMN	Jenis Barang	Kuantitas	Nilai
1	Peralatan dan Mesin	Unit Power Supply	1 buah	32.477.786
2	Peralatan dan Mesin	Auto Switch/Data Switch	1 buah	3.368.680
3	Aset Tetap Lainnya	Serial Lainnya	8 buah	37.500

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
Rp440.084.223*

C.10 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing Rp440.084.223 dan Rp397.812.757. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

*Tabel 18
Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya*

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	Nilai Buku
Software	25.700.000	22.487.500	3.212.500
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	417.634.223	417.596.723	37.500
Jumlah	443.334.223	440.084.223	3.250.000

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Utang kepada Pihak Ketiga
Rp97.025.918

C.11 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp97.025.918 dan Rp84.870.725. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada BPS Kabupaten Lingga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 19
Rincian Utang Pada Pihak Ketiga 2022 dan 2021

Jenis	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	96.091.168	84.043.725
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	934.750	827.000
Jumlah	97.025.918	84.870.725

Sampai dengan 31 Desember 2022 Utang kepada Pihak Ketiga pada satuan kerja BPS Kabupaten Lingga sebesar Rp 97.025.918,- berikut rinciannya:

- Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar sebesar Rp 96.091.168,- terdiri dari

No.	Uraian	Akun	Nilai Terutang (Rp)
1	Tunjangan Kinerja Desember 2022	512411	86.269.520
2	Uang Makan Desember 2022	511129	9.671.000
3	Kekurangan Gaji Pokok PNS Desember 2022	511111	132.100
4	Kekurangan Tunjangan Istri PNS Desember 2022	511121	13.210
5	Kekurangan Tunjangan Anak PNS Desember 2022	511122	5.284
6	Kekurangan Pembulatan	511119	54
	Jumlah		96.091.168

- Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar sebesar Rp 934.750,-; yang terdiri dari tagihan-tagihan pemakaian barang/jasa pada bulan Desember 2022, diantaranya sebagai berikut :

No.	Uraian	Akun	Nilai Terutang (Rp)
1	Tagihan Internet Indihome Desember 2022	521111	807.750
2	Tagihan Air PDAM Desember 2022	522113	127.000
	Jumlah		934.750

Keseluruhan utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 tersebut telah dilunasi per 31 Januari 2023. Bukti pembayaran terdapat pada lampiran (Monitoring Utang Pihak ketiga / Daftar Jurnal Umum).

Ekuitas
Rp2.949.658.185

C.12 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp2.949.658.185 dan Rp3.076.248.513. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

*Pendapatan PNBPN
Rp1.821.552*

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.821.552 dan Rp1.670.476. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 20

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Naik(Turun)%
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	1.821.552	1.670.476	9,04
Jumlah	1.821.552	1.670.476	9,04

Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya pada satuan kerja BPS Kabupaten Lingga per 31 Desember 2022 mengalami peningkatan hingga 9,04 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Tabel 21

Perbandingan Nilai LO dan LRA Pendapatan Negara Bukan Pajak Sampai 31 Desember 2022

Uraian	Nilai LO	Nilai LRA	Selisih
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	1.821.552	1.821.552	0
Jumlah	1.821.552	1.821.552	0

Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan adalah merupakan Pendapatan atas Sewa Rumah Dinas yang dihuni oleh Kepala BPS Kabupaten Lingga, dimana setiap bulannya dilakukan pemotongan melalui SPM Gaji Induk yang besarnya mengacu pada SK KPA BPS Provinsi Kepulauan Riau Nomor 038 Tahun 2021 tanggal 13 Desember 2021, Perihal Penunjukan Penghuni Rumah Negara Golongan 1 di lingkungan BPS Provinsi Kepulauan Riau.

*Beban Pegawai
Rp2.084.256.601*

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp2.084.256.601 dan Rp1.944.574.003. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

*Tabel 22
Rincian Beban Pegawai 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Naik(Turun)%
Beban Gaji Pokok PNS	700.011.920	744.626.220	(5,99)
Beban Pembulatan Gaji PNS	15.178	12.369	22,71
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	29.299.832	48.697.110	(39,83)
Beban Tunj. Anak PNS	9.559.128	12.367.940	(22,71)
Beban Tunj. Struktural PNS	19.800.000	52.560.000	(62,33)
Beban Tunj. Fungsional PNS	98.250.000	24.480.000	301,35
Beban Tunj. PPh PNS	2.022.800	1.484.634	36,25
Beban Tunj. Beras PNS	34.327.080	38.889.540	(11,73)
Beban Uang Makan PNS	124.692.000	121.830.000	2,35
Beban Tunjangan Umum PNS	21.715.000	20.355.000	6,68
Beban Uang Lembur	2.386.000	9.766.000	(75,57)
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	1.042.177.663	869.505.190	19,86
Jumlah	2.084.256.601	1.944.574.003	7,18

Bisa diuraikan bahwa salah satu penyebab Beban Pegawai mengalami kenaikan sebesar 7,18 persen yakni terdapat penambahan jumlah pegawai secara signifikan (mutasi masuk 8 orang sedangkan mutasi keluar hanya 1 orang). Kenaikan terjadi terutama pada Beban Tunjangan Fungsional PNS yang disebabkan perubahan struktur organisasi dan Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan) karena peningkatan grade pada beberapa pegawai yang dilantik menjadi pejabat fungsional.

Meski begitu, terdapat beberapa pos pada Beban Belanja Pegawai per 31 Desember 2022 mengalami penurunan dibanding periode sama tahun lalu, yaitu Beban Tunjangan Suami/Istri PNS, Beban Tunjangan Anak, dan Tunjangan Beras, yang penurunannya disebabkan perubahan komposisi

pegawai dari tahun sebelumnya banyak yang sudah berkeluarga beralih menjadi banyak pegawai yang berstatus belum menikah. Demikian halnya dengan penurunan Beban Belanja Struktural PNS yang turun drastis karena peralihan beberapa pejabat struktural menjadi pejabat fungsional.

Tabel 23
Perbandingan Nilai LO dan LRA Beban Pegawai Sampai 31
Desember 2022

Uraian	Nilai LO	Nilai LRA	Selisih
Beban Gaji Pokok PNS	700.011.920	700.262.020	(250.100)
Beban Pembulatan Gaji PNS	15.178	15.340	(162)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	29.299.832	29.324.842	(25.010)
Beban Tunj. Anak PNS	9.559.128	9.553.844	5.284
Beban Tunj. Struktural PNS	19.800.000	19.800.000	0
Beban Tunj. Fungsional PNS	98.250.000	98.250.000	0
Beban Tunj. PPh PNS	2.022.800	2.022.800	0
Beban Tunj. Beras PNS	34.327.080	34.327.080	0
Beban Uang Makan PNS	124.692.000	125.856.000	(1.164.000)
Beban Tunjangan Umum PNS	21.715.000	21.715.000	0
Beban Uang Lembur	2.386.000	2.386.000	0
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	1.042.177.663	1.028.696.232	13.481.431
Jumlah	2.084.256.601	2.072.209.158	12.047.443

Selisih Beban Pegawai ini terkait sistem pelaporan Akrual 2021 dan 2022. **Akrual 2021:** terdapat Beban Pegawai Bulan Desember 2021 namun dibayarkan di tahun 2022 (menggunakan anaggaran tahun 2022) sehingga diakui sebagai Beban di tahun 2021 dan pada Laporan Operasional tahun 2021 tidak diakui sebagai Beban. Sementara itu, pada Laporan Realisasi akan diakui sebagai realisasi 2022 (karena anggaran tahun 2022). Demikian juga dengan **Akrual 2022:** terdapat Beban Pegawai Bulan Desember 2022 namun dibayarkan di tahun 2023 (menggunakan anggaran tahun 2022) sehingga diakui sebagai beban di tahun 2022 dan pada Laporan Operasional tahun 2022 tidak diakui sebagai Beban. Sementara itu, pada Laporan Realisasi akan diakui sebagai realisasi 2023 (karena anggaran tahun 2023).

Maka dari itu terjadi selisih antara pengakuan Beban dan Realisasi Keuangan. Berikut uraian Biaya yang menjadi Beban pegawai terkait akrual tersebut:

Selisih antara nilai LO dan LRA Beban Uang Makan PNS berasal dari:

- Jurnal balik akrual basis per 31 Januari 2022 atas pelunasan kekurangan uang makan pegawai bulan Desember 2021 sebesar Rp 9.671.000,-

Selisih Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan) berasal dari:

- Jurnal balik akrual basis per 31 Januari 2023 atas pelunasan kekurangan Tunjangan Kinerja pegawai bulan Desember 2022 sebesar Rp86.269.520,-

Selisih Beban Gaji Pegawai berasal dari:

- Jurnal balik akrual basis per 31 Januari 2023 atas pelunasan kekurangan Gaji Pegawai pegawai bulan Desember 2022 sebesar Rp132.100,-

Selisih Beban Tunjangan Istri berasal dari:

- Jurnal balik akrual basis per 31 Januari 2023 atas pelunasan kekurangan Tunjangan Istri pegawai bulan Desember 2022 sebesar Rp13.210,-

Selisih Beban Tunjangan Anak berasal dari:

- Jurnal balik akrual basis per 31 Januari 2023 atas pelunasan kekurangan Tunjangan Anak pegawai bulan Desember 2022 sebesar Rp5.284,-

Selisih Beban Pembulatan Gaji berasal dari:

- Jurnal balik akrual basis per 31 Januari 2023 atas pelunasan kekuranganPembulatan Gaji bulan Desember 2022 sebesar Rp54,-

No	Uraian	Akrual	Akrual	Selisih
		31-12-2022	31-12-2021	
1	Beban Gaji Pokok PNS	132.100	382.200	(250.100)
2	Beban Pembulatan Gaji PNS	54	216	(162)
3	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	86.269.520	72.788.089	13.481.431
4	Beban Uang Makan PNS	9.671.000	10.835.000	(1.164.000)
5	Beban Tunj. Istri/ Suami	13.210	38.220	(25.010)
6	Beban Tunjangan Anak	5.284	-	5.284
Jumlah		96.091.168	84.043.725	12.047.443

*Beban
Persediaan
Rp163.852.121*

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan sampai 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp163.852.121 dan Rp106.669.381. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Beban persediaan pada satuan kerja BPS Kabupaten Lingga berasal dari pembelian dan transfer masuk barang persediaan konsumsi. Dibandingkan dengan tahun 2021, Beban Persediaan Konsumsi secara total di tahun 2022 mengalami kenaikan hingga 53,61 persen utamanya diakibatkan oleh meningkatnya kuantitas atau volume pengiriman barang persediaan dari BPS Provinsi Kepulauan Riau untuk kegiatan lapangan seperti Longform SP2020 dan Persiapan ST2023. Padahal pembelian barang persediaan konsumsi baik berupa ATK, ARK dan komputer supplies pada periode waktu yang sama justru mengalami penurunan.

*Tabel 24
Rincian Beban Persediaan 31 Desember 2022 dan 31 Desember
2021*

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Naik(Turun)%
Beban Persediaan konsumsi	163.852.121	106.669.381	53,61
Jumlah	163.852.121	106.669.381	53,61

Beban
Barang dan
Jasa
Rp2.632.451
.296

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp2.632.451.296 dan Rp887.267.940. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Tabel 25
Rincian Beban Barang dan Jasa sampai 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Naik(Turun)%
Beban Keperluan Perkantoran	231.440.460	218.112.160	6,11
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	582.540	2.243.940	(74,04)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	85.980.000	86.800.000	(0,94)
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	13.194.610	13.000.000	1,50
Beban Bahan	245.270.038	90.547.000	170,88
Beban Honor Output Kegiatan	1.955.616.500	413.879.400	372,51
Beban Barang Non Operasional Lainnya	14.144.898	3.157.500	347,98
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	20.630.000	7.850.000	162,80
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	11.990.000	0	0,00
Beban Langganan Listrik	31.085.250	26.071.500	19,23
Beban Langganan Air	974.000	283.200	243,93
Beban Sewa	5.743.000	0	0,00
Beban Jasa Profesi	3.800.000	0	0,00
Beban Jasa Lainnya	12.000.000	19.933.240	(39,80)
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0	5.390.000	(100,00)
Jumlah	2.632.451.296	887.267.940	196,69

Merujuk pada tabel di atas, sebagian besar Beban Barang dan Jasa mengalami kenaikan, kenaikan tertinggi pada Beban Honor Output Kegiatan hingga 375,51 persen, diikuti Beban Barang Non Operasional Lainnya kenaikannya 347,98 persen, serta Belanja Bahan naik hingga 170,88 persen; dimana ketiganya berfungsi sebagai pendukung utama pelaksanaan kegiatan prioritas BPS sepanjang tahun 2022 seperti Pendataan Awal Regsosek 2022, Longform SP2020, dan Pemutakhiran Wilkerstat ST2023. Beban langganan listrik dan beban langganan air juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan disebabkan penambahan jumlah pegawai dan perubahan bentuk ruangan dari yang sebelum tersekat menjadi satu kesatuan. Perubahan bentuk ruangan rupanya menyebabkan pemakaian pendingin ruangan menjadi lebih meningkat dibanding kondisi sebelumnya.

Sedangkan penurunan utamanya terjadi pada Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat yang disebabkan berkurangnya pengiriman surat/dokumen dalam bentuk hardcopy, dan penurunan pada Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 yang dikarenakan tidak ada lagi kegiatan yang membutuhkan rapid test antigen di tahun 2022.

Tabel 26
Perbandingan Nilai LO dan LRA Beban Barang dan Jasa Sampai 31
Desember 2022

Uraian	Nilai LO	Nilai LRA	Selisih
Beban Keperluan Perkantoran	231.440.460	231.432.710	7.750
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	582.540	582.540	0
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	85.980.000	85.980.000	0
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	13.194.610	13.194.610	0
Beban Bahan	245.270.038	252.464.388	(7.194.350)
Beban Honor Output Kegiatan	1.955.616.500	1.955.616.500	0
Beban Barang Non Operasional Lainnya	14.144.898	14.144.898	0
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	20.630.000	20.630.000	0
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	11.990.000	11.990.000	0
Beban Langganan Listrik	31.085.250	31.085.250	0
Beban Langganan Air	974.000	874.000	100.000
Beban Sewa	5.743.000	18.243.000	(12.500.000)
Beban Jasa Profesi	3.800.000	3.800.000	0
Beban Jasa Lainnya	12.000.000	12.000.000	0
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0	0	0
Jumlah	2.632.451.296	2.652.037.896	(19.586.600)

Selisih Beban Barang dan Jasa ini terkait sitem pelaporan Akrual 2021 dan 2022.

Akrual 2021 : terdapat Beban Barang dan Jasa Bulan Desember 2021 namun dibayarkan di tahun 2022 (menggunakan anggaran tahun 2022) sehingga diakui sebagai Beban di tahun 2021 dan pada pada Laporan Operasional tahun 2022 tidak diakui sebagai Beban sementara pada Laporan Realisasi akan diakui sebagai realisasi 2022 (karena anggaran tahun 2022).

Akrual 2022 : terdapat Beban Barang dan Jasa Bulan Desember 2022 namun dibayarkan di tahun 2023 (menggunakan anggaran tahun 2022) sehingga diakui sebagai Beban di tahun 2022 dan pada pada Laporan Operasional tahun 2023 tidak diakui sebagai Beban sementara pada Laporan Realisasi akan diakui sebagai realisasi 2023 (karena anggaran tahun 2023). Demikian sehingga terjadi selisih antara pengakuan Beban dan Realisasi Keuangan. Berikut uraian Biaya akrual tersebut :

Selisih antara nilai LO dan LRA Beban Keperluan Perkantoran berasal dari:

- Jurnal balik akrual basis per 31 Januari 2023 atas pelunasan tagihan Indihome bulan Desember 2021 sebesar Rp807.750,-.

Selisih Beban Langganan Air berasal dari:

- Jurnal balik akrual basis per 31 Januari 2023 atas pelunasan tagihan PDAM bulan Desember 2021 sebesar Rp127.000,-.

No	Uraian	Akrual	Akrual	Selisih
		31-12-2022	31-12-2021	
1	Beban Keperluan Perkantoran	807.750	800.000	7.750
2	Beban Langganan Air	127.000	27.000	100.000
	Jumlah	934.750	827.000	107.750

*Beban
Pemeliharaan
Rp139.237.856*

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Sampai 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp139.237.856 dan Rp145.615.388. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

*Tabel 27
Rincian Beban Pemeliharaan Sampai 31 Desember 2022 dan 31
Desember 2021*

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Naik(Turun)%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	49.649.975	59.799.561	(16,97)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	85.518.881	81.949.727	4,36
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	4.069.000	3.866.100	5,25
Jumlah	139.237.856	145.615.388	(4,38)

Dari tabel di atas, Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar 4,38 persen. Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan turun sebesar 16,97 persen, sedangkan Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin naik 4,36 persen dan Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan naik sebesar 5,25 persen jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Tabel dibawah menyajikan informasi bahwa nilai Beban Pemeliharaan antara LO dan LRA:

- Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Tidak ada Selisih
- Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Tidak ada Selisih,
- Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan Terdapat Selisih

Tabel 28
Perbandingan Nilai LO dan LRA Beban Pemeliharaan Sampai 31 Desember 2022

Uraian	Nilai LO	Nilai LRA	Selisih
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	49.649.975	49.649.975	0
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	85.518.881	85.518.881	0
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	4.069.000	0	4.069.000
Jumlah	139.237.856	135.168.856	4.069.000

Beban pemeliharaan senilai Rp4.069.000 yang disajikan di Laporan Operasional berasal dari pemakaian persediaan untuk pemeliharaan yang diperoleh dari realisasi belanja persediaan barang pemeliharaan, sedangkan nilai LRA sebesar Rp0 pada akun Beban bahan persediaan untuk pemeliharaan berdasarkan akuntansi berbasis akrual tidak menimbulkan beban pemeliharaan pada Laporan Operasional.

*Beban
Perjalanan
Dinas
Rp1.101.840.565*

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas sampai 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp1.101.840.565 dan Rp364.194.721. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Tabel 29
Rincian Perjalanan Dinas sampai 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Naik(Turun)%
Beban Perjalanan Biasa	122.717.590	73.137.721	67,79
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	254.306.000	130.187.000	95,34
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	704.546.000	160.870.000	337,96
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	20.270.975	0	0,00
Jumlah	1.101.840.565	364.194.721	202,54

Seiring semakin terkendalinya penanganan pandemi Covid-19 baik skala nasional maupun daerah dan seluruh pegawai telah kembali menerapkan sistem kerja dari Kantor atau WFO (*Work From Office*), serta telah diijinkannya pelaksanaan paket meeting pada sarana akomodasi secara offline maka semua Beban Perjalanan Dinas mengalami lonjakan yang sangat signifikan dibanding tahun 2021.

Tabel 30
Perbandingan Nilai LO dan LRA Beban Perjalanan Dinas Sampai 31 Desember 2022

Uraian	Nilai LO	Nilai LRA	Selisih
Beban Perjalanan Biasa	122.717.590	122.717.590	0
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	254.306.000	254.306.000	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	704.546.000	704.546.000	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	20.270.975	20.270.975	0
Jumlah	1.101.840.565	1.101.840.565	0

Tidak terdapat selisih antara Beban Perjalanan Biasa pada LO dan LRA nilainya sama-sama Rp122.717.590,-; Beban Perjalanan Dinas dalam Kota pada LO dan LRA nilainya sama-sama Rp 254.306.000, Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota pada LO dan LRA nilainya sama-sama Rp 704.546.000,-, dan Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota pada LO dan LRA nilainya sama-sama Rp 20.270.975,-. Mengingat tidak terdapat pencatatan akrual untuk Belanja Perjalanan Dinas ini. Hal tersebut bisa dilihat pada Laporan Operasional (LO) dan Neraca Percobaan Akrual.

*Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp183.013.437*

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi sampai 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp183.013.437 dan Rp188.623.083. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

*Tabel 31
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Sampai 31 Desember
2022 dan 31 Desember 2021*

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Naik(Turun)%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	146.160.419	151.113.815	(3,28)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	30.428.018	30.428.018	0,00
Beban Amortisasi Software	6.425.000	6.425.000	0,00
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0	656.250	(100,00)
Jumlah	183.013.437	188.623.083	(2,97)

Beban penyusutan peralatan dan mesin turun sebesar 2,97 persen. Hal ini dikarenakan hanya terjadi penyusutan reguler hampir pada semua jenis BMN, dimana banyak BMN yang sudah habis masa manfaatnya (tidak ada lagi penyusutan pada BMN tersebut) namun masih berfungsi baik, sehingga nilai penyusutan/amortisasi secara total justru berkurang pada tahun 2022.

Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp13.959.000

D.8 Kegiatan Non Operasional

Pos dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional sampai 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 32
Rincian Kegiatan Non Operasional sampai 31 Desember 2022 dan
31 Desember 2021

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Naik(Turun)%
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar			
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	53.705.000	(100,00)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar			
Beban Kerugian Pelepasan Aset	0	1.312.500	(100,00)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	15.120.000	0	0,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Beban Persediaan Rusak/Usang	1.161.000	0	0,00
Jumlah	13.959.000	52.392.500	(73,36)

Pada 31 Desember 2022 BPS Kabupaten Lingga mengalami defisit dari kegiatan non operasional sebesar Rp13.959.000,- yang berasal dari:

- Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya sebesar Rp0,-
- Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp15.120.000,-
- Beban Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp0,-
- Beban Persediaan Rusak/Usang sebesar Rp1.161.000,-

Nilai tersebut bisa dilihat pada Laporan Operasional (LO) dan Neraca Percobaan Akrual untuk masing-masing uraian tersebut diatas.

E.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp3.076.248.513

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2022 dan 1 Januari 2021 adalah masing-masing sebesar Rp3.076.248.513 dan Rp3.151.537.323.

Defisit LO
Rp6.288.871.324

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp6.288.878.173 dan Rp3.582.881.540. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Nilai koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp3.864.400. Rincian saldo koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas adalah sebagai berikut:

Tabel 33
Rincian Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Koreksi Atas Reklasifikasi	0	3.864.400
Jumlah	0	3.864.400

Tidak terdapat rincian koreksi yang menambah/mengurangi entitas pada satuan kerja BPS Kabupaten Lingga per 31 Desember 2022, sedangkan pada periode tahun sebelumnya masih terdapat nilai rincian koreksi yang berasal dari Koreksi atas Reklasifikasi pada aset tetap lainnya sebesar yaitu Rp 3.864.400,-. Hal ini disebabkan perbedaan metode pencatatan terkait bahan cetak berupa buku/publikasi, yang biasanya diinput melalui aplikasi SIMAK dengan metode Reklasifikasi Masuk, saat ini menggunakan aplikasi SAKTI dengan metode pencatatan Perolehan Lainnya.

*Koreksi Atas
Reklasifikasi Rp0*

E.3.1 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp3.864.400.

Munculnya nilai koreksi atas reklasifikasi pada satuan kerja BPS Kabupaten Lingga terdiri dari reklasifikasi masuk berupa buku dan publikasi statistik di tahun 2021 dengan nilai sebesar Rp 3.864.000,-. Sedangkan untuk tahun 2022, reklasifikasi pada menu aset tetap tidak digunakan sama sekali, karena pencatatan buku/publikasi menggunakan Perolehan Lainnya.

*Transaksi Antar
Entitas
Rp6.162.287.845*

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp6.162.287.845 dan Rp3.503.728.330. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

*Tabel 34
Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas*

Jenis	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021(Rp)
Ditagihkan ke Entitas Lain	6.041.511.475	3.535.244.122
Diterima dari Entitas Lain	(16.941.552)	(55.375.476)
Transfer Masuk	137.717.922	23.859.684
Jumlah	6.162.287.845	3.503.728.330

- Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan Transaksi entitas Belanja,
- Diterima dari Entitas Lain merupakan Transaksi entitas Pendapatan,
- Transfer Masuk merupakan Perpindahan Aset dari entitas BPS Provinsi Kepulauan Riau (sebagai Pengirim) ke satker BPS Kabupaten Lingga (sebagai Penerima).

Lebih jelas tentang Transaksi antar entitas tersebut di atas akan diuraikan di bawah ini.

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada satuan kerja yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2022, DDEL sebesar minus Rp16.941.552 sedangkan DKEL sebesar Rp6.041.511.475.

- Diterima Dari Entitas Lain (DDEL) sebesar Rp16.941.552,- merupakan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah, diantaranya.

No	Akun	Uraian	Nilai (Rp)
1	425129	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	15.120.000
2	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	1.821.552
Total			16.941.552

- Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL) sebesar Rp 6.041.511.475,- merupakan Realisasi Anggaran Belanja (Netto), diantaranya:

No	Akun	Uraian	Nilai (Rp)
1	5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1.041.126.926
2	5122	Belanja Lembur	2.386.000
3	5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	1.028.696.232
4	5211	Belanja Barang Operasional	331.189.860
5	5212	Belanja Barang Non Operasional	2.254.845.786
6	5218	Belanja Barang Persediaan	77.450.000
7	5221	Belanja Jasa	66.002.250
8	5231	Belanja Pemeliharaan	137.973.856
9	5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.101.840.565
Total			6.041.511.475

Penurunandalam pos DDEL pada tahun 2022 dibanding tahun sebelumnya utamanya disebabkan karena ketiadaan pendapatan dari pemindahtanganan BMN seperti tahun sebelumnya. Sedangkan kenaikan dalam pos DKEL tahun 2022 disebabkan Pagu anggaran yang mengalami peningkatan signifikan dibanding tahun sebelumnya.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp137.717.922. Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp0.

Tabel 35
Rincian Transfer Masuk Per 31 Desember 2022

Entitas Asal	Jenis	Aset Diterima	Akumulasi Transaksional	Nilai Buku Aset (Rp)
Jumlah		0	0	0

Total nilai Transfer Masuk periode 31 Desember 2022 ini sebesar Rp 137.717.922,- pada BPS Kabupaten Lingga merupakan barang kiriman dari BPS Provinsi Kepulauan Riau berupa barang konsumsi (perlengkapan lapangan, buku pedoman, kuesioner, dan lain-lain) sebesar sebanyak 21.787 buah dengan nilai Rp 117.167.922,- serta aset tetap perlengkapan komputer berupa printer sebanyak satu buah senilai Rp20.550.000,-

Ekuitas Akhir
Rp2.949.665.034

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp2.949.658.185 dan Rp3.076.248.513.

Nilai Ekuitas Akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas ini akan selalu sama dengan nilai Ekuitas yang disajikan pada Neraca.

F. PENGUNGKAPAN LAINNYA

Pengungkapan lain-lain pada BPS Kabupaten Lingga yang diungkapkan dalam Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 ini terdiri dari:

F.1 Pejabat Perbendaharaan

Berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) nomor 01/KPA/2022 tertanggal 6 Januari 2022, susunan awal pejabat perbendaharaan yang bertugas melakukan pengelolaan anggaran pada BPS Kabupaten Lingga terdiri dari :

- Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) : Donny Cahyo Wibowo (Kepala),
- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : Nunik Sri Rahayu (Statistisi Ahli Muda)
- Pejabat Pemeriksa dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) : Arief Hidayat (Kasubbag Umum)
- Bendahara Pengeluaran : Zuhratul Aini (Statistisi Ahli Pertama)

Pada tanggal 04 April 2022, sesuai dengan KPA nomor 22/KPA/2022 dilakukan revisi pertama atas Keputusan KPA nomor 01/KPA/2022 tertanggal 6 Januari 2022 yang disebabkan karena PPK yang sedang menjabat harus menjalani cuti melahirkan selama tiga bulan, sehingga harus segera dilakukan penggantian agar kegiatan perbendaharaan dapat tetap berjalan seperti biasanya. Adapun susunan pengelola anggaran pasca perubahan pertama ini terdiri dari:

- Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) : Donny Cahyo Wibowo (Kepala),
- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : Zuhratul Aini (Statistisi Ahli Pertama)
- Pejabat Pemeriksa dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) : Arief Hidayat (Kasubbag Umum)
- Bendahara Pengeluaran: Feby Vanessa Wandri (Pelaksana)

Pada tanggal 11 April 2022, sesuai dengan Keputusan KPA nomor 24/KPA/2022 dilakukan revisi kedua atas Keputusan KPA nomor 01/KPA/2022 tertanggal 6 Januari 2022 yang disebabkan batalnya SK KPA nomor 22/KPA/2022 tanggal 4 April 2022 karena Bendahara Pengeluaran yang ditunjuk belum memiliki sertifikat Bendahara Negara Tersertifikasi (BNT), sehingga perlu menunjuk bendahara pengeluaran yang baru. Adapun susunan pengelola anggaran pasca perubahan kedua ini terdiri dari:

- Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) : Donny Cahyo Wibowo (Kepala),
- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : Zuhratul Aini (Statistisi Ahli Pertama)
- Pejabat Pemeriksa dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) :
- Arief Hidayat (Kasubbag Umum)
- Bendahara Pengeluaran: Utary Hafiza (Pelaksana)

Sesuai dengan Keputusan KPA nomor 28/KPA/2022 pada tanggal 1 Juli 2022 dilakukan revisi ketiga atas Keputusan KPA nomor 01/KPA/2022 tertanggal 6 Januari 2022 yang disebabkan

penggantian pada posisi Bendahara Pengeluaran untuk memperlancar koordinasi dan konsolidasi internal satuan kerja. Adapun susunan pengelola anggaran pasca perubahan ketiga ini terdiri dari:

- Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) : Donny Cahyo Wibowo (Kepala),
- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : Zuhrotul Aini (Statistisi Ahli Pertama)
- Pejabat Pemeriksa dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) : Arief Hidayat (Kasubbag Umum)
 - Bendahara Pengeluaran: Feby Vanessa Wandri (Statistisi Pelaksana)

F.2 Rekonsiliasi

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 yang berakhir pada periode 31 Desember 2022 ini telah disusun berdasarkan data yang sudah dilakukan rekonsiliasi antara BPS Kabupaten Lingga dan KPPN Tanjungpinang sesuai dengan Surat Hasil Rekonsiliasi (SHR) SAKTI –SPANbulan Desember 2022 yang diterbitkan secara otomatis pada tanggal 23 Januari 2023. Surat Hasil Rekonsiliasi tersebut terlampir pada Laporan Keuangan ini.

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	6.236.194.000	6.236.194.000	0
2	Belanja	6.057.659.875	6.057.659.875	0
3	Pengembalian Belanja	-16.148.400	-16.148.400	0
4	Estimasi Pendapatan	1.822.000	1.822.000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	16.941.552	16.941.552	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0		0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0		0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

F.3 Rekening Pemerintah

Rekening Pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional BPS Kabupaten Lingga sampai dengan periode 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Nomor Rekening	017401000495303
Nama Rekening	: BPG 009 BPS Kabupaten Lingga.
Bank	: Bank Rakyat Indonesia (BRI)
Peruntukan	: Kegiatan Bendahara Pengeluaran
Status	: Aktif

F.4 Anggaran

F. 4. 1 DIPA Awal

Pagu DIPA awal yang diterima BPS Kabupaten Lingga berdasarkan DIPA Nomor: SP DIPA-054.01.2.667201/2022 tanggal 15 Desember 2021 sebesar Rp 3.904.189.000,-. Sedangkan hingga revisi yang terakhir pagu DIPA telah mengalami kenaikan hingga 59,73 persen menjadi Rp 6.236.194.000,-.

F. 4. 2 Revisi DIPA

Perubahan anggaran atau Revisi DIPA pada BPS Kabupaten Lingga telah dilakukan sebanyak 16 kali sepanjang pelaksanaan tahun anggaran 2022. Anggaran Revisi DIPA BPS Kabupaten Lingga terlampir pada Laporan Keuangan ini. Adapun Revisi DIPA yang telah dilakukan BPS Kabupaten Lingga secara lebih rinci sebagai berikut

1) Revisi DIPA I (DJA) DS: 5706-5093-2203-8135

Revisi DIPA ke-1 BPS Kabupaten Lingga dengan pagu tetap Rp 3.904.189.000,- Nomor: SP DIPA- 054.01.2.667201/2022 tanggal 15 Desember 2021. Dasar revisi adalah surat BPS Pusat Nomor: B-760/02000/PR.440/12/202 tanggal 10 Desember 2021 tentang pemblokiran Tunjangan Kinerja yang melekat pada Gaji ke-13 dan THR

2) Revisi DIPA II (DJA) DS : 1483-6904-0664-4857

Revisi DIPA ke-2 BPS Kabupaten Lingga dari pagu Rp 3.904.189.000,- menjadi Rp 4.303.703.000. Nomor DIPA: SP DIPA- 054.01.2.667201/ 2022 tanggal 09 Februari 2022 sesuai surat revisi Nomor : B-057/02000/ PR.440/01/2022 tanggal 02 Februari 2022 tentang Penambahan/ Pengurangan Alokasi dan/atau Target RO Prioritas Nasional

3) Revisi DIPA III (DJPB) DS : 1483-6904-0664-4857

Revisi DIPA ke-3 BPS Kabupaten Lingga dengan pagu tetap Rp 4.303.703.000,- Nomor DIPA: SP DIPA- 054.01.2.667201/2022 tanggal 15 Februari 2022. Sesuai surat revisi Nomor: S-034/BPS/2104.92800/ 02/2022 tanggal 11 Februari 2022 yang memuat Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA dan Pemutakhiran Data Hasil Revisi POK

4) Revisi DIPA IV (DJPB) DS : 1483-6904-0664-4857

Revisi DIPA ke-4 BPS Kabupaten Lingga dengan pagu tetap Rp 4.303.703.000,- Nomor DIPA: SP DIPA- 054.01.2.667201/2022 tanggal 7 April 2022. Sesuai surat KPA BPS Kabupaten Lingga Nomor: S-053/2104.92800/04/2022 tanggal 05 April 2022 perihal revisi Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA dan Pemutakhiran Data Hasil Revisi POK

5) Revisi DIPA V (DJA) DS : 3750-9201-3339-7654

Revisi DIPA ke-5 BPS Kabupaten Lingga dari pagu Rp 4.303.703.000,- menjadi Rp 4.363.730.000,-. Nomor DIPA: SP DIPA-054.01.2.667201/ 2022 tanggal 27 Mei 2022 sesuai surat Sestama BPS Nomor : B-258/ 02000/PR.440/04/2022 tanggal 18 April 2022 tentang Revisi Anggaran dalam rangka Penyesuaian Kegiatan Tahun 2022

6) Revisi DIPA VI (DJA) DS : 6685-6063-9510-0358

Revisi DIPA ke-6 BPS Kabupaten Lingga dengan pagu tetap Rp 4.363.730.000 Nomor DIPA: SP DIPA- 054.01.2.667201/2022 tanggal 15 Juni 2022 sesuai surat Pengguna Anggaran BPS Nomor B-186/01000/PR.440/05/2022 tanggal 31 Mei 2022 perihal Penambahan *Automatic Adjustment* Belanja TA 2022.

7) Revisi DIPA VII (DJPB) DS : 6685-6063-9510-0358

Revisi DIPA ke-7 BPS Kabupaten Lingga dengan pagu tetap Rp 4.363.730.000,- Nomor DIPA: SP DIPA- 054.01.2.667201/2022 tanggal 12 Juli 2022. Revisi berdasarkan surat dari KPA BPS Kabupaten Lingga Nomor: S-097/2104.92800/07/2022 tanggal 08 Juli 2022 perihal revisi Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA dan Pemutakhiran Data Hasil Revisi POK.

8) Revisi DIPA VIII (DJA) DS : 1086-1539-6504-2918

Revisi DIPA ke-8 BPS Kabupaten Lingga dari pagu Rp 4.363.730.000,- menjadi Rp 4.762.576.000,- Nomor DIPA: SP DIPA-054.01.2.667201/2022 tanggal 11 Agustus 2022. Revisi didasarkan surat Sekretaris Utama BPS Nomor : B-501/02000/ PR.440/07/2022 tanggal 22 Juli 2022 tentang Revisi Anggaran dalam rangka Penyesuaian Kegiatan Tahun 2022.

9) Revisi DIPA IX (DJA) DS : 8188-1580-0050-0199

Revisi DIPA ke-9 BPS Kabupaten Lingga dari pagu Rp 4.762.576.000,- menjadi Rp 6.458.388.000,- Nomor DIPA: SP DIPA-054.01.2.667201/ 2022 tanggal 25 Agustus 2022. Revisi didasarkan surat Sekretaris Utama BPS Nomor : B-585/02000/PR.440/08/2022 tanggal 23 Agustus 2022 tentang Dasar Hitung Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) tahun 2022.

10) Revisi DIPA X (DJA) DS : 7215-6797-4201-4331

Revisi DIPA ke-10 BPS Kabupaten Lingga tidak mengalami perubahan nilai pagu, nilai tetap Rp 6.458.388.000,- dengan nomor DIPA: SP DIPA-054.01.2.667021/2022 tanggal 29 Agustus 2022. Revisi didasarkan surat Sekretaris Utama BPS Nomor: B-603/02000/PR.440/ 08/2022 tanggal 26 Agustus 2022 perihal Revisi DIPA Pembukaan Blokir Anggaran Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Tahun 2022.

11) Revisi DIPA XI (DJPB) DS : 7215-6797-4201-4331

Revisi ke-11 DIPA BPS Kabupaten Lingga dengan tidak ada perubahan nilai pagu, tetap Rp. 6.458.388.000,- dengan Nomor DIPA : SP DIPA-054.01.2.667021/2022 tanggal 26 September 2022. Revisi didasarkan surat Sekretaris Utama BPS Nomor : B-1100/ 02100/PR.440/09/2022 tanggal 11 September 2022 tentang Tanggapan Permohonan Ijin Revisi Halaman IV.B DIPA TA 2022 se-Provinsi Kepulauan Riau.

12) Revisi DIPA XII (DJPB) DS : 7215-6797-4201-4331

Revisi DIPA ke-12 DIPA BPS Kabupaten Lingga dengan tidak ada perubahan nilai pagu, tetap Rp. 6.458.388.000,- dengan Nomor DIPA: SP DIPA-054.01.2.667021/2022 tanggal 3 Oktober 2022. Revisi didasarkan surat dari KPA BPS Kabupaten Lingga Nomor: B-141/21041/PR.440/09/2022 Tanggal 29 September 2022 perihal revisi Pencantuman/ Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA dan Pemutakhiran Data Hasil Revisi POK.

13) Revisi DIPA X (DJA) DS : 2354-0176-1755-7930

Revisi ke-13 DIPA BPS Kabupaten Lingga dengan perubahan pagu anggaran dari Rp 6.458.388.000,- menjadi Rp 6.408.966.000,- dengan Nomor DIPA : SP DIPA-054.01.2.667021/2022 tanggal 20 Oktober 2022. Revisi didasarkan Surat Sekretaris Utama Nomor: B-731/02000/PR.440/09/2022 tanggal 30 September 2022 tentang Revisi Anggaran dalam rangka Pemenuhan Kekurangan Belanja Pegawai dan Penyesuaian Kegiatan Tahun 2022.

14) Revisi DIPA XIV (DJPB) DS : 3038-2606-7010-3010

Revisi DIPA ke-14 BPS Kabupaten Lingga dari pagu Rp 6.408.966.000,- menjadi Rp 6.446.766.000,- dengan Nomor DIPA : SP DIPA-054.01.2.667021/2022 tanggal 24 November 2022. Revisi didasarkan surat dari KPA BPS Kabupaten Lingga Nomor: B-164/21041/PR.440/11/ 2022 Tanggal 18 November 2022 perihal Usulan Revisi Anggaran antar Satker.

15) Revisi DIPA XV (DJA) DS : 9433-6728-3743-5097

Revisi DIPA ke-15 BPS Kabupaten Lingga mengalami perubahan pagu anggaran dari Rp 6.446.766.000,- menjadi Rp 6.236.194.000,- dengan Nomor DIPA: SP DIPA-054.01.2.667021/2022 tanggal 12 Desember 2022. Revisi didasarkan Surat Sekretaris Utama BPS Nomor: B-988/ 02000/PR.440/11/2022 tanggal 24 November 2022 tentang Revisi Anggaran dalam rangka Realokasi *Automatic Adjustment* ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.

16) Revisi DIPA Revisi DIPA XVI (DJPB) DS : 9433-6728-3743-5097

Revisi DIPA ke-16 DIPA BPS Kabupaten Lingga tidak terdapat perubahan nilai pagu, tetap Rp. 6.236.194.000,- dengan Nomor DIPA : SP DIPA-054.01.2.667021/2022 tanggal 29 Desember 2022. Revisi didasarkan surat dari KPA BPS Kabupaten Lingga Nomor: B-218/21041/PR.440/12/2022 tanggal 28 Desember 2022 perihal revisi Pencantuman/ Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA dan Pemutakhiran Data Hasil Revisi POK.

F.5 Jurnal-Jurnal

Sampai dengan akhir periode pelaporan tanggal 31 Desember 2022, BPS Kabupaten Lingga telah melakukan penyesuaian dalam jurnal penyesuaian, yaitu Jurnal Balik atas transaksi akrual bulan Desember 2021 berupa Belanja Yang Masih Harus Dibayar yaitu:

1. Tunjangan Kinerja bulan Desember 2021,
2. Uang Makan bulan Desember 2021,
3. Kekurangan Gaji Pokok bulan Oktober-Desember 2021,
4. Tagihan Internet Telkom Indihome bulan Desember 2021,
5. Tagihan Air PDAM Kabupaten Lingga bulan Desember 2021.

F.6 Kerjasama

Hingga akhir periode pelaporan tanggal 31 Desember 2022, tidak terdapat Kerjasama yang dilakukan oleh BPS Kabupaten Lingga dengan Lembaga/Instansi Pemerintah lainnya.

F.7 Ralat SPM

Hingga akhir periode pelaporan tanggal 31 Desember 2022, BPS Kabupaten Lingga tidak pernah melakukan Ralat SPM sepanjang tahun anggaran 2022.

F.8 Penanganan Pandemi Covid di Lingkup Satker

Sejak merebaknya Corona Virus Diseases 19 (Covid-19) di Indonesia pada awal Maret 2020, dirasakan sangat berdampak pada segala aspek kehidupan baik pada tatanan kehidupan sosial masyarakat maupun perilaku budaya kerja. Tidak terkecuali di BPS Kabupaten Lingga. Perubahan pola kerja dampak pandemi Covid-19 sangat besar terhadap kinerja BPS dalam pengumpulan sekaligus pengolahan data. Dengan adanya penerapan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, selalu mencuci tangan menggunakan sabun dan atau *hand sanitizer* serta *physical distancing* tentunya berakibat pada perubahan kebutuhan anggaran penanganan COVID 19. Berbeda dengan tahun 2020 awal kemunculan Covid-19, meskipun tidak sebanyak penyediaan pos anggaran penanganan Covid-19 seperti tahun 2021, pada tahun 2022 ini pada DIPA BPS Kabupaten Lingga juga telah menyediakan pagu anggaran belanja penanganan Covid-19 walaupun awalnya terdapat pada tiga kode akun, seiring waktu hingga akhir periode tahun anggaran 2022 terdapat beberapa perubahan anggaran Covid-19 pada DIPA BPS Kabupaten Lingga. Pada periode 31 Desember 2021 berikut rincian realisasi Penanganan Covid-19 pada BPS Kabupaten Lingga:

Kode Akun	Uraian	Pagu Anggaran Awal	Pagu Anggaran Menjadi	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Jenis Barang
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	10.450.000	17.475.000	13.194.610	4.280.000	Suplemen dan multivitamin, infrared thermometer
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	4.795.000	21.250.000	20.630.000	620.000	Perlengkapan petugas lapangan dan pengolahan berupa masker dan handsanitizer.
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	0	3.000.000	3.000.000	0	Masker, hand sanitizer, disinfectant spray, sabun cuci tangan.
522192	Belanja Jasa – Penanganan Pandemi COVID-19	6.540.000	0	0	0	-
TOTAL		41.725.000	36.824.610	36.824.610	4.900.390	